

**IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG
FISIK DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KOTA SAMARINDA**

Muhammad Ilham, Fajar Apriani, Thalita Rifda Khaerani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 4, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Implementasi Strategi Pembangunan Bidang Fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

Pengarang : Muhammad Ilham

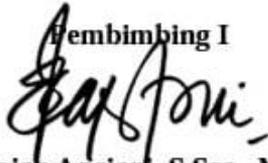
NIM : 1402015163

Program Studi : Administrasi Publik

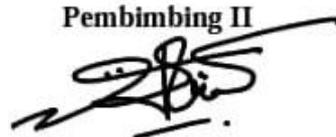
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk di onlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul

Samarinda, 8 April 2022

Pembimbing I


Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si
NIP. 19830414 200501 2 003

Pembimbing II


Thalita Rifda Khaerani, S.AP., M.Si
NIP. 20181019 890922 2 001

Bagian di bawah ini
DI ISI OLEH STAF PROGRAM STUDI YANG DITUGASKAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Koordinator Administrasi Publik
Volume : 9	 <u>Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si</u> NIP. 19830414 200501 2 003
Nomor : 4	
Tahun : 2022	
Halaman : 5802 - 5815 (Genap)	

IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG FISIK DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

Muhammad Ilham¹, Fajar Apriani², Thalita Rifda Khaerani³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatannya. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian program, anggaran, prosedur atau SOP, evaluasi dan kontrol, serta faktor penghambat. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi strategi pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, tertera di Laporan Kinerja sudah terealisasi oleh Kecamatan Samarinda Seberang. Anggaran untuk pembangunan fisik tahun 2020 tersedia sebesar Rp. 435.781.500.000, bersumber dari dana Pemprov Kaltim. Prosedur atau SOP dalam pelaksanaan pembangunan fisik, tidak hanya dari pihak Kecamatan Samarinda Seberang, tetapi juga diketahui oleh Pemprov Kaltim, dan Pemkot Samarinda. Evaluasi dan kontrol yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan fisik yaitu untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program pembangunan, sesuai dengan rencana tersusun dengan jelas, baik dari segi anggaran maupun segi evaluasi, yang diperlukan dalam tercapainya program, dari proses perencanaan, penerapan program, proses pelaksanaan program dan proses evaluasi program. Faktor penghambat pembangunan fisik dari terlambatnya anggaran, waktu pembangunan yang singkat, prosedur untuk mendapatkan anggaran, dan pelaksana kurang memahami tugas dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi Strategi, Strategi Pembangunan, Pembangunan Fisik.

PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah perkotaan akan berdampak pada perubahan sosial, ekonomi geografi, lingkungan dan budaya, sehingga fasilitas pendukung

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Milham496@gmail.com

²Dosen pembimbing, Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³Dosen pembimbing, Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan mendukung tingkat pertumbuhan di banyak sektor. Indikator dalam pertumbuhan pengembangan di daerah/kota dilihat, dari penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung dan menghasilkan kelancaran dan kelanjutan pelaksanaan pembangunan. Penyediaan fasilitas yang direncanakan akan menjadi bagian dari struktur ruang yang memiliki penghubung dan roda dan roda kegiatan dalam penataan ruang. Kemampuan fasilitas sosial untuk melayani penduduk akan menjadi tolak ukur keberhasilan pengembangan wilayah/kota.

Dalam melakukan pembangunan, setiap pemerintah membutuhkan perencanaan yang tepat dan harus dapat mengevaluasi prestasi pembangunan. Dengan pesatnya perkembangan sektor jasa, organisasi dan lembaga masyarakat, terkemuka kualitas ekonomi dan lingkungan hidup, maka peningkatan permintaan untuk data dan indikator pembangunan diperlukan adalah bahwa sesuai dengan rencana yang telah ditentukan kebutuhan untuk monitoring kerjasama dalam pembangunan bidang fisik di suatu tempat.

Kota Samarinda, yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki kesamaan dengan beberapa kota di Kalimantan Timur, yang kaya hasil tambang dan pertanian yang berkembang pesat, juga sektor pariwisata yang menonjol sebagai salah satu devisa pendapatan daerah Kota Samarinda. Kota Samarinda memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan, salah satu kecamatan dari 10 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Samarinda Seberang yang memiliki banyak permasalahan terkait pembangunan bidang fisik. Kecamatan Samarinda Seberang terdiri dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Masjid, Kelurahan Baqa dan Kelurahan Sungai Keledang. Kecamatan Samarinda Seberang memiliki visi yaitu: "Pembangunan yang terkoordinasi dengan partisipasi masyarakat serta pelaksanaan pelayanan yang prima". Visi Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang tersebut tentu tidak terlepas dari visi dan misi Walikota Samarinda dalam mewujudkan pembangunan di Kota Samarinda.

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2016-2021, isu strategis dan permasalahan strategis Kecamatan Samarinda Seberang di tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembangunan bidang fisik antara lain masalah kelembagaan masyarakat dan institusi, yaitu masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang untuk mengatasi permasalahan pembangunan bidang fisik yaitu:

1. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif.
2. Melakukan pengawasan kepada kelurahan yang mengimplementasikan program Hidup Bersih dan Sehat (HBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), ke aktifan Pos Kamling, kegiatan monitoring K3 (Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan), tingkat partisipasi masyarakat dalam persiapan perencanaan pengembangan kecamatan dan program proposal masyarakat di desa yang direkomendasikan di tingkat kecamatan.

Walaupun telah dirumuskan strategi-strategi tersebut, namun hasil

observasi dan wawancara penulis dengan pegawai Kecamatan Samarinda Seberang pada 25 Mei 2020, permasalahan strategis Kecamatan Samarinda Seberang dalam pembangunan bidang fisik, antara lain:

1. Instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan atau koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembangunan berwawasan lingkungan.
2. Masih perlu ditingkatkannya pembangunan sumber daya manusia, yang membutuhkan fasilitas pendukung, seperti dari penyediaan fasilitas pendidikan yang perlu perbaikan. (berdasarkan data dari kantor Samarinda Seberang dalam Angka Tahun 2018-2019).
3. Sejumlah prioritas pembangunan bidang fisik belum terlaksana seperti: jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigasi. Walaupun di Kecamatan Samarinda Seberang telah dibuat penganggarannya.

Sejumlah permasalahan tersebut di atas tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan bidang fisik oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang sebab kelancaran program pembangunan bidang fisik membutuhkan kinerja pemerintah yang optimal disertai adanya keterlibatan masyarakat.

Strategi yang dirumuskan agar mendukung kelancaran program pembangunan bidang fisik, yang tertuang dalam Rencana Strategi Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2016-2021, yang terkait dalam pembangunan bidang fisik yaitu:

1. Pembangunan fasilitas pendidikan sarana dan prasarana sekolah, dan kerjasama UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan dengan UPTD Puskesmas Kecamatan dalam menyediakan Kantin sekolah, karena dalam penjualan makanan di sekolah tidak memenuhi syarat. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak di sekolah mendapatkan makanan jajanan yang sehat dan berkualitas melalui pengelolaan kantin sekolah yang sehat.
2. Diterapkan program 3R oleh masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang, dalam pengelolaan sampah. Program pengelolaan sampah melalui TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dan Bank Ramli (Ramah Lingkungan) oleh masyarakat yang terus-menerus digiatkan dengan metode 3R dan penanaman pohon pelindung dan peneduh. 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya, disamping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber energy/Gas Methane yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari.

Dengan melihat uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Implementasi Strategi Pembangunan Bidang Fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori ***Pembangunan Daerah***

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan standar hidup

masyarakat, negara yang tidak baik untuk lebih baik, menggunakan sumberdaya yang ada. Pembangunan mengarah pada perubahan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Rogers (dalam Rogers, dkk, 2011:3), pembangunan adalah perubahan yang berguna dalam sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan untuk kehendak suatu bangsa. Selain itu, menurut

Rochajat, dkk (2011:3), pembangunan merupakan pengembangan awal yang digunakan dalam arti pertumbuhan ekonomi, masyarakat dianggap berhasil dalam mencapai pembangunan, jika pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup tinggi. Dengan demikian yang di ukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas setiap tahun.

Sedangkan untuk konsep pembangunan daerah, menurut Sjafrizal (2014:19) menegaskan sifat pembangunan regional, yaitu masalah utama dalam pembangunan daerah terletak pada fokus pada kebijakan pembangunan berdasarkan karakteristik-karakteristik regional yang bersangkutan menggunakan potensi sumber daya manusia, institusi, dan sumber daya fisik. Orientasi ini memandu pertumbuhan inisiatif yang bersangkutan menggunakan potensi sumber daya manusia, institusi, dan sumber daya fisik. Orientasi ini menuntun pertumbuhan inisiatif dan kreativitas wilayah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan beberapa konsep tersebut, maka penulis dapat memahami bahwa pembangunan daerah merupakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik, aspirasi, dan kreatifitas daerah, yang meliputi seluruh bidang atau fungsi yang kewenangannya diberikan kepada daerah terkait pemanfaatan setiap potensi sumberdaya yang dimilikinya dalam menunjang pembangunan daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kerangka otonomi daerah.

Kemudian dalam pelaksana pembangunan, dikemukakan beberapa hal yaitu dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembangunan. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2011:39), di dalam proses pembangunan ada lima dimensi yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan: a. Sosial, b. Budaya, c. Ekonomi, d. Politik
2. Faktor sumberdaya manusia perencanaan
3. Faktor sistem digunakan.
4. Faktor perkembangan ilmu dan teknologi
5. Faktor pendanaan

Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2011:331), merupakan indikasi keberhasilan pembangunan daerah. Faktor yang mempengaruhi pembangunan yaitu sebagai berikut: 1. Faktor Sumberdaya Manusia, 2. Faktor Sumber Daya Alam, 3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 4. Faktor Budaya, 5. Faktor Sumberdaya Kapital.

Kebijakan Pembangunan

Kebijakan didefinisikan menurut Frederick (dalam Agustino, 2016:5),

sebagai serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah di lingkungan tertentu dalam kasus hambatan dan peluang untuk melaksanakan kebijaksanaan yang diusulkan untuk mencapai tujuan. Pendapat ini juga menunjukkan gagasan politik yang menyiratkan perilaku yang memiliki tujuan dan merupakan bagian penting dari definisi politik, karena keseluruhan kebijakan harus menunjukkan dari apa yang benar-benar dilakukan bahwa apa yang diusulkan dalam suatu masalah.

Menurut Muhadjir (2011:15), kebijakan adalah upaya untuk memecahkan masalah sosial dalam kepentingan publik atas prinsip keadilan dan kemakmuran masyarakat, dan dalam politik setidaknya harus mencapai empat hal penting, yaitu:

1. Tingkat hidup komunitas meningkat.
2. Terjadi keadilan dan bahwa kemungkinan implementasi dan penciptaan individu.
3. Memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam partisipasi masyarakat (untuk membahas pertanyaan, perencanaan, keputusan, dan implementasi).
4. Pembangunan berkelanjutan dijamin.

Menurut Subandi (2011:9), pembangunan pada umumnya dilampirkan pada konteks studi perubahan, pengembangan di sini ditafsirkan dari perubahan yang direncanakan, setiap orang atau kelompok tertentu yang mengharapkan perubahan yang menjadi lebih baik dari sebelumnya, untuk mencapai harapan ini tentu harus memerlukan rencana. Rencana pembangunan yang harus lebih terasa seperti upaya yang lebih rasional dan teratur untuk pengembangan orang-orang yang belum berkembang. Kebijakan pembangunan dikaitkan dengan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Nomor 3 dan Menteri Urusan Internal Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pada tahap, prosedur untuk mempersiapkan, mengendalikan dan mengevaluasi implementasi Rencana Pembangunan Daerah Pasal 76, yaitu unit prosedur perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk menghasilkan media jangka panjang, menengah, dan rencana pengembangan tahunan yang diterapkan oleh elemen-elemen penyelenggara negara dan masyarakat di pusat dan daerah.

Implementasi Strategi

Berdasarkan pendapat Mulyadi (2015:12), implementasi merupakan tindakan yang bertujuan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini dalam diagram operasional dan mencoba untuk mencapai perubahan besar atau perubahan kecil, seperti yang ditentukan sebelumnya. Implementasi juga merupakan upaya untuk memahami apa yang akan terjadi setelah program.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2011:68), implementasi adalah implementasi keputusan politik dasar, umumnya dalam bentuk hukum, tetapi mungkin juga dalam bentuk perintah atau keputusan eksekutif penting

atau keputusan tubuh keadilan. Sebagai aturan umum, keputusan mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menunjukkan bahwa tujuan yang akan dicapai dan berbagai cara untuk menyusun atau mengatur proses implementasi. Kemudian Meter Van dan Horn Van (dalam Taufik dan Israel, 2013:136), tahap implementasi tidak dimulai pada saat itu dan tujuan yang ditetapkan oleh keputusan politik sebelumnya, fase implementasi baru terjadi setelah keberhasilan legislatif dan distribusi sumber daya dan dana yang disepakati.

Dari definisi di atas, maka penulis dapat memahami bahwa implementasi adalah suatu proses kegiatan yang terencana, yang saling menyesuaikan dan berinteraksi untuk mengembangkan suatu kebijakan dalam menyempurnakan suatu program agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Clauswitz (dalam Hamali, 2016:25), menyatakan bahwa strategi secara umum didefinisikan sebagai cara mencapai tujuan. Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Ruslan (2010:20), strategi adalah tindakan bertambah (semakin meningkat) dan terus menerus tergantung pada sudut pandang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang bisa terjadi dan bukan apa yang sedang terjadi.

Sedangkan pendapat lain menurut Effendi (2010:32), strategi adalah rencana dan manajemen untuk mencapai tujuan. Tetapi mencapai strategi objektif ini tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan manajemen, tetapi harus dapat menunjukkan caranya taktik operasional.

Pengertian strategi dari beberapa pakar ahli di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa strateginya adalah langkah-langkah atau sarana yang direncanakan dengan mengintegrasikan semua sumber daya dan kapasitas untuk mencapai tujuan.

Menurut Hunger dan Wheelen (2012:71), mengatakan implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mencapai strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Prosesnya dapat mencakup perubahan global perubahan budaya, struktur dan manajemen organisasi secara keseluruhan. Kecuali ketika perubahan radikal dalam masyarakat, manajer tingkat menengah dan bawah akan menerapkan strateginya secara khusus dengan pertimbangan manajemen puncak.

Menurut Solihin (2012:64), implementasi strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajemen yang dihasilkan dari proses formulasi dan implementasi rencana untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selama waktu ini, menurut Sampurno (2013:4), implementasi strategis terdiri dari analisis, keputusan (*decisions*) dan tindakan dari organisasi untuk menciptakan dan melestarikan keunggulan kompetitif.

Konsep dan alat untuk merumuskan strategi tidak berbeda secara signifikan antara organisasi kecil dan besar, grafik organisasi yang mencari keuntungan dan organisasi nirlaba. Namun, implementasi strategi secara signifikan berbeda tergantung pada jenis dan ukuran organisasi. Masalah

manajemen yang mengelilingi implementasi strategi termasuk pengembangan tujuan tahunan, untuk membuat kebijakan, untuk mengalokasikan sumber daya, untuk memodifikasi struktur organisasi yang ada, restrukturisasi, dan redepensasi, dari revisi insentif dan hadiah untuk karyawan, untuk mengurangi resistensi Untuk mengubah, menyelaraskan strategi, manajer budaya pengembangan yang mendukung strategi, menyesuaikan proses produksi/ operasi, pmengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif dan, jika perlu, mendepresiasi ukuran masyarakat. Perubahan manajemen menjadi lebih luas saat strategi baru akan di implementasikan oleh masyarakat di arah baru.

Jadi dapat disimpulkan implementasi strategi adalah suatu proses kegiatan yang terencana, yang saling menyesuaikan dan berinteraksi dalam serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat, pemerintah untuk mengembangkan suatu kebijakan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Rachmat (2014:32), implementasi strategi adalah proses manajemen dalam melakukan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, prosedur, evaluasi dan kontrol.

1. Program, yaitu pernyataan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program ini menyiratkan restrukturisasi perusahaan, perubahan dalam budaya masyarakat atau mengantisipasi bisnis penelitian baru.
2. Anggaran, yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk unit keuangan, setiap program akan dirinci secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengontrol. Selain secara resmi menentukan laporan keuangan untuk mencerminkan kebutuhan yang diberikan dalam periode tertentu, yang menunjukkan efek yang diharapkan dari situasi keuangan perusahaan.
3. Prosedur untuk pengoperasian atau Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu sistem atau teknik berurutan menggambarkan secara rinci bagaimana tugas atau pekerjaan dilakukan oleh program perusahaan.
4. Evaluasi dan Kontrol, yaitu perbandingan kinerja perusahaan dengan hasil yang diharapkan dari perusahaan. Kinerja adalah hasil akhir dari suatu kegiatan.

Hunger dan Wheelen (2012:72), menyebutkan dalam konsep perkembangan dalam pengembangan konsep manajemen strategis di empat langkah:

1. Perencanaan keuangan dasar: pada titik ini manajer mulai membuat perencanaan yang serius, terutama ketika diundang untuk mengajukan anggaran serius untuk tahun berikutnya.
2. Perencanaan berdasarkan perkiraan: Karena realisasi anggaran tahunan dianggap kurang bermanfaat untuk merangsang perencanaan jangka panjang, manajer akan mencoba menawarkan rencana selama lima tahun ke depan.
3. Perencanaan strategis: mengawasi situasi konflik politik di dalam perusahaan, sambil memperoleh pada saat yang sama dengan rencana lima

tahun tidak bekerja secara efektif, manajemen superior kemudian mengendalikan proses perencanaan dengan memulai aktivitas perencanaan.

4. Manajemen strategis: Menyadari bahwa rencana strategis terbaik tidak akan berguna tanpa kontribusi dan komitmen manajer di level yang lebih rendah, manajer utama pada langkah berikutnya adalah kelompok perencanaan yang terdiri dari manajer dan karyawan utama. Berbagai tingkat manajemen kelompok kerja, mereka telah mengembangkan serangkaian rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan.

Definisi Konsepsional

Implementasi strategi pembangunan bidang fisik adalah pelaksanaan tindakan untuk menjalankan rencana pembangunan sarana dan prasarana publik melalui program-program.

Metode penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang berisi tanda-tanda yang mengandung, yaitu data nyata yang sebenarnya di distrik Samarinda Seberang, Kota Samarinda (dilapangan). Sumber data yang digunakan adalah data utama, yaitu Camat, Sekretaris, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan pegawai Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Teknik analisis data dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Millles, Huberman dan Saldana (2014:14) yang terdiri dari tahapan: pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Fokus penelitian yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi strategi pembangunan bidang fisik, yaitu: a. Program, b. Anggaran, c. Prosedur atau SOP, d. Evaluasi dan kontrol.
2. Faktor penghambat implementasi strategi pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Strategi Pembangunan Bidang Fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

Implementasi strategi pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda indikatornya terdiri dari sub fokus yang tersaji sebagai berikut:

Program

Program adalah pernyataan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program ini melibatkan restrukturisasi instansi, perubahan budaya masyarakat atau mengantisipasi tugas dan fungsi instansi kecamatan yang baru.

Program pembangunan di bidang fisik seperti semenisasi, pembuatan dan perbaikan jalanan baru dari semen dan kayu, perbaikan gorong-gorong, drainase, perbaikan parit-parit dan pembuatan pondasi, pengelolaan tempat sampah, dan lainnya. Program pembangunan yang sudah terealisasi, sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Seberang. Program pembangunan bidang fisik yang sudah direncanakan berhasil dilaksanakan, masih sedang berjalan di Kecamatan Samarinda Seberang.

Menurut Sjafrizal (2014:19) menegaskan sifat pembangunan regional, yaitu masalah utama dalam pembangunan daerah terletak pada fokus pada kebijakan pembangunan berdasarkan karakteristik-karakteristik regional yang bersangkutan menggunakan potensi sumber daya manusia, institusi, dan sumber daya fisik. Orientasi ini menuntun pertumbuhan inisiatif dan kreativitas wilayah dalam proses pembangunan.

Camat, Kepala Seksi, dan pegawai bersama langsung pergi ke lokasi, dengan melaksanakan program pembangunan bidang fisik sesuai dengan tugas dan tujuan program. Seperti semenisasi di jalan besar dan di gang-gang, pembuatan jalanan baru dan perbaikan jalanan kayu, perbaikan gorong-gorong, drainase, perbaikan parit-parit dan pembuatan pondasi, pengelolaan tempat sampah, dan lainnya.

Tolak ukur penilaian pihak Kecamatan Samarinda Seberang mengenai program yang sudah direncanakan dalam pembangunan tersebut, telah dilaksanakan karena disesuaikan terhadap anggaran yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang. Program pembangunan yang sudah direncanakan, hampir semua telah berhasil dicapai dengan baik, ada beberapa sasaran pembangunan yang pelaksanaannya kurang optimal walaupun sudah dilaksanakan, dikarenakan kemampuan keuangan dan kondisi Pandemi Covid 19.

Program pembangunan di Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2020 tidak hanya dibidang sosial dan ekonomi saja, tetapi pembangunan dibidang fisik yang menjadi prioritas utama. Program kecamatan yang sudah direncanakan yaitu pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana di Kecamatan Samarinda Seberang. Pelaksanaan program pembangunan yang telah terencana di Kecamatan Samarinda Seberang, berhasil dilaksanakan yang sudah disesuaikan dengan anggaran sumber pendukung.

Anggaran

Anggaran adalah program yang ditunjukkan dalam bentuk unit perak, setiap program akan dirinci secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengontrol. Selain menentukan laporan keuangan format yang menunjukkan efek yang diharapkan dari situasi keuangan instansi kecamatan.

Anggaran untuk pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2020 ada tersedia tetapi tidak cukup untuk seluruh pembangunan, dikarenakan anggaran untuk pembangunan bidang fisik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh daerah tersebut. Anggaran yang tersedia, akan dipergunakan untuk

mewujudkan program-program dalam pembangunan di Kecamatan Samarinda Seberang sebesar Rp. 435.781.500.000.

Kecamatan Samarinda Seberang harus melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, salah satunya anggaran atas *output* yang ingin dicapai di tahun 2020. Anggaran yang tersedia, akan dipergunakan untuk mewujudkan program-program dalam pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang, karena anggaran pembangunan kota, di alokasikan dari anggaran pembangunan yang dikelola daerah alokasi untuk pembangunan kota. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2011:39), dalam proses pengembangan, ada lima dimensi yang membutuhkan perhatian yaitu faktor lingkungan, faktor sumberdaya manusia perencana, faktor sistem digunakan, faktor perkembangan ilmu dan teknologi, serta faktor pendanaan/anggaran.

Sumber anggaran untuk pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang, merupakan dana pembangunan kota, untuk menunjang berbagai upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Anggaran tersalurkan untuk pembangunan fisik di Kecamatan Samarinda Seberang.

Kecamatan Samarinda Seberang pada tahun 2020 memiliki anggaran untuk pembangunan fisik, sosial dan ekonomi sebesar Rp. 2.460.601.125, dan yang terealisasi sebesar Rp. 2.436.619.625, Kecamatan Samarinda Seberang menggunakan untuk melaksanakan pembangunan di bidang fisik sebesar Rp. 435.781.500.000. Anggaran yang ada, dapat dipergunakan untuk mewujudkan program-program dalam pembangunan di bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang, Sumber anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Anggaran yang sudah tersalurkan dalam pembangunan di bidang fisik, mencukupi terhadap program pembangunan.

Prosedur atau Standar Operating Procedures (SOP)

Prosedur untuk pengoperasian *Standar Operating Procedures (SOP)*, yaitu sistem atau teknik berurutan menggambarkan secara rinci bagaimana tugas atau pekerjaan diselesaikan oleh program instansi kecamatan. Prosedur dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan. Sesuai dengan perencanaan tidak hanya dari pihak Kecamatan Samarinda Seberang, tetapi diketahui oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Samarinda.

Prosedur atau *Standar Operating Procedures (SOP)* dalam pembangunan di bidang fisik sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan. Prosedur dalam pelaksanaan pembangunan di bidang fisik yang diterapkan, bertujuan untuk menghasilkan produk pembangunan yang berkualitas, yang nantinya dirasakan dan diketahui oleh semua masyarakat di wilayah kota Samarinda. Penerapan prosedur akan mendukung dengan baik keberhasilan pembangunannya.

Menurut Yakob (2012:14), menjelaskan bahwa prosedur ini merupakan kolaborasi prosedur terkait untuk melaksanakan tujuan dan aktivitas tertentu.

Dengan demikian, dari dua deskripsi, kita dapat menyimpulkan bahwa prosedur ini adalah tugas dan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan.

Prosedur pelaksanaan pembangunan fisik yang sesuai dan dapat diaplikasikan berdasarkan kondisi sumber daya yang ada di Kota Samarinda khususnya di Kecamatan Samarinda Seberang, seperti pembangunan dan perbaikan gedung, jalan, perbaikan paret dan gorong-gorong, dan pembangunan lainnya. Prosedur koordinasi juga ada dilaksanakan seperti keterlibatan Lurah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bina marga dan lainnya, yang membahas rencana pembangunan fisik melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Samarinda Seberang.

Tujuan dari ditetapkannya prosedur atau SOP untuk pelaksanaan pembangunan di bidang fisik, Pemerintah Kota Samarinda dari Wali Kota sebagai atasan kepala subdistrict, Lurah, masyarakat dan agensi dianggap terkait dengan pengembangan fisik. Selain itu, koordinasi antar badan (instansi), unit yang fungsinya berbeda, tetapi lembaga yang merupakan bagian dari mereka tergantung atau memiliki kaitan baik dalam penerapan prosedur pembangunan di bidang fisik, sehingga mendukung pembangunan dengan baik keberhasilannya.

Evaluasi dan Kontrol

Evaluasi dan kontrol adalah perbandingan kinerja instansi kecamatan dengan hasil yang diharapkan dari instansi kecamatan. Kinerja adalah hasil akhir dari suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Kecamatan Samarinda Seberang, dibutuhkan kerjasama dari proses perencanaan program, proses penerapan program, proses pelaksanaan program, dan proses evaluasi program.

Evaluasi dan kontrol sudah dilakukan Kecamatan Samarinda Seberang dalam pelaksanaan pembangunan fisik untuk mengkaji kegiatan-kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana tersusun dengan jelas, baik dari segi anggaran maupun segi evaluasi, yang diperlukan untuk tercapainya program, berdasarkan proses perencanaan, penerapan program, proses pelaksanaan program, dan proses evaluasi program.

Hasil dari evaluasi dan kontrol dilakukan atas pelaksanaan pembangunan bidang fisik yang telah berjalan, dengan mengidentifikasi kekurangan dan yang menyebabkan kemacetan jalannya kegiatan pembangunan. Tindaklanjut dari kegiatan evaluasi dan kontrol yang sudah kami lakukan yaitu memerlukan pengadaan, pembetulan, penambahan, pelancaran, peningkatan secara proporsional, evaluasi pada waktu pelaksanaan pembangunan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaannya, dan evaluasi saat kegiatan prioritas sudah selesai diselenggarakan, yang bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan, menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindaklanjut dari kegiatan evaluasi dan kontrol yang sudah dilakukan yaitu mengatasi temuan permasalahan yang menghambat

pembangunan.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun perbaikan kebijakan ataupun perencanaan pembangunan berikutnya apabila diperlukan. Bentuk evaluasi dan kontrol yang dilaksanakan dalam pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang secara terus-menerus atau secara berkala selama program atau kegiatan pembangunan berjalan. Hasil evaluasi dan kontrol yang kami lakukan atas pelaksanaan pembangunan bidang fisik yang telah berjalan yaitu membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasilnya terhadap rencana dan standar. Tindakan lanjut dari kegiatan evaluasi dan kontrol yang sudah dilakukan yaitu mengatasi terhadap masalah-masalah yang terjadi di saat pembangunan berjalan.

Faktor Penghambat Implementasi Strategi Pembangunan Bidang Fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

Faktor-faktor yang menerapkan strategi pembangunan fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda adalah hal-hal yang dapat menghambat aparatur dalam melaksanakan strategi pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, yaitu belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, karena masih ada program yang belum selesai, dana pemerintah yang terlambat untuk menghambat penyelesaian program pembangunan fisik di Kecamatan Samarinda Seberang, waktu pelaksanaan pembangunan yang singkat, sehingga untuk menyelesaikan program pembangunan tidak sesuai dengan target yang ditentukan, prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan anggaran, dan staf pelaksana program pembangunan, kurang memahami dengan baik tugasnya masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai implementasi strategi pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi strategi pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, diidentifikasi dari:
 - a. Program pembangunan di bidang fisik seperti semenisasi, pembuatan dan perbaikan jalanan baru dari semen dan kayu, perbaikan gorong-gorong, drainase, perbaikan parit-parit dan pembuatan pondasi, pengelolaan tempat sampah, dan lainnya sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Seberang. Program pembangunan bidang fisik yang sudah direncanakan berhasil dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Seberang.
 - b. Anggaran untuk pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2020 tersedia tetapi tidak cukup untuk seluruh pembangunan, dikarenakan anggaran untuk pembangunan bidang fisik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola daerah alokasi untuk pembangunan kota. Anggaran yang

tersedia, akan dipergunakan untuk mewujudkan program-program dalam pembangunan di Kecamatan Samarinda Seberang sebesar Rp. 435.781.500.000.

- c. Prosedur atau *Standar Operating Procedures (SOP)* dalam pembangunan dibidang fisik sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan. Prosedur dalam pelaksanaan pembangunan di bidang fisik yang diterapkan, bertujuan untuk menghasilkan produk pembangunan yang berkualitas, yang nantinya dirasakan dan diketahui oleh semua masyarakat di wilayah kota Samarinda. Penerapan prosedur akan mendukung dengan baik keberhasilan pembangunannya.
 - d. Evaluasi dan kontrol sudah dilakukan Kecamatan Samarinda Seberang dalam pelaksanaan pembangunan fisik untuk mengkaji kegiatan-kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana tersusun dengan jelas, baik dari segi anggaran maupun segi evaluasi, yang diperlukan untuk realisasi program, dari proses perencanaan, penerapan program, proses pelaksanaan program dan proses evaluasi program.
2. Faktor penghambat implementasi strategi pembangunan bidang fisik di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda adalah pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, terlambatnya anggaran, waktu pelaksanaan pembangunan yang singkat, prosedur untuk mendapatkan anggaran, dan staf pelaksana program kurang memahami tugas dengan baik.

Saran

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Camat Samarinda Seberang Kota Samarinda sebaiknya mengatasi masalah atas keterlambatan anggaran, caranya dengan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas anggaran pembangunan untuk Kota Samarinda, yang khususnya untuk pembangunan di Kecamatan Samarinda Seberang.
2. Camat dapat melakukan tindak lanjut terhadap staf/pegawai Kecamatan Samarinda Seberang sebagai pelaksana atau pegawai di Kecamatan Samarinda Seberang yang masing-masing kurang memahami mengenai tugasnya untuk keterlibatannya dalam pembangunan, bisa dilakukan dengan melakukan rapat internal.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Effendi, Bachtar. 2010. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2012. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi.
- Milles, B. Mathew, A. Michael Huberman dan Johny Saldana. 2014.

- Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Muhadjir, Noeng. 2011. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2011. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rochajat, Harun dkk. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sampurno. 2013. *Manajemen Strategik: Menciptakan Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta
- Solihin, Ismail. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taufik dan Lister Israil. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yakub. 2012. *Pengantar Sistem informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.